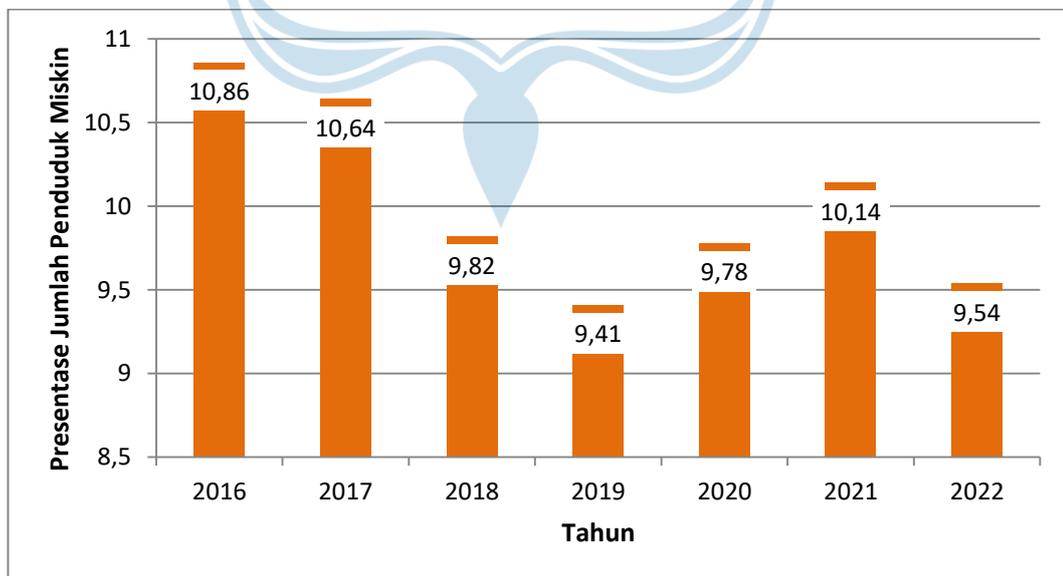


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi negara di dunia, baik negara berkembang maupun maju. Menurut Todaro dan Smith (2011) kemiskinan merupakan seseorang yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan kesehatan yang buruk, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan buruk serta memperoleh penghasilan yang rendah. Dalam laporan *East Asia and The Pasific Economic* bulan Oktober 2022, Indonesia menempati peringkat ke-73 negara miskin di dunia dan peringkat ke-2 negara miskin di Asia Tenggara (ASEAN). Gambar berikut adalah perkembangan angka kemiskinan di Indonesia tahun 2016 – 2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah

Gambar 1. 1
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2016 menjadi sebesar 10,86 persen hingga tahun 2019 sebesar 9,41 persen. Di tahun 2020 adanya Pandemi Covid-19 angka ini meningkat menjadi 9,78 persen, kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali dan tahun 2022 berhasil menurun menjadi 9,54 persen.

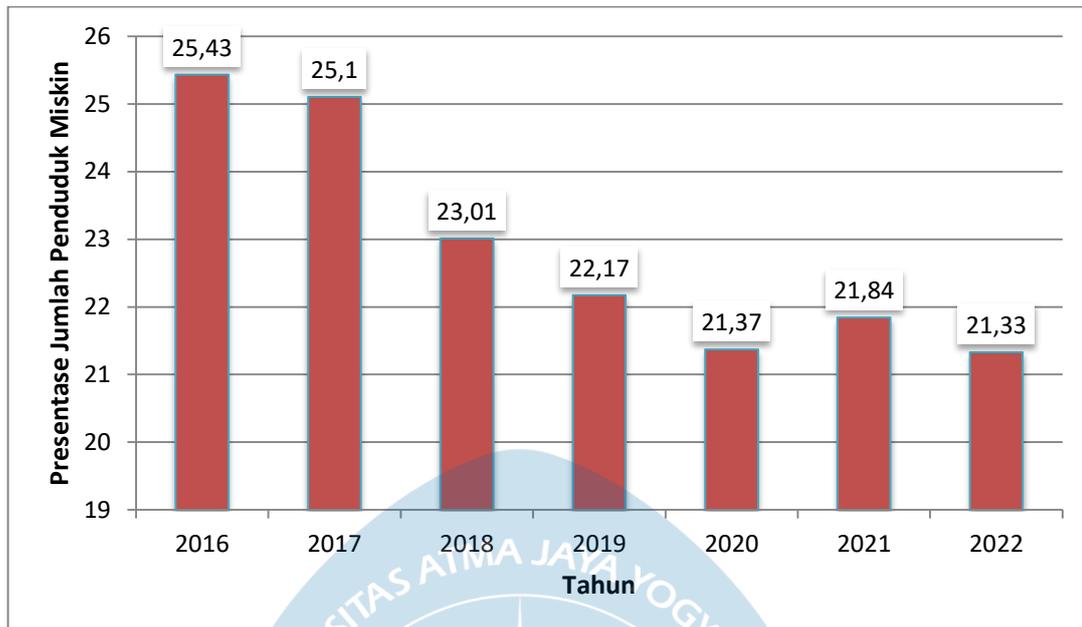
Lima Provinsi yang mempunyai angka kemiskinan tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo (Badan Pusat Statistika, 2023). Berikut adalah kondisi kemiskinan di lima Provinsi di Indonesia tahun 2016 dan 2022.

Tabel 1. 1
Persentase Jumlah Penduduk Miskin terbanyak di Indonesia

No.	Provinsi	Tahun 2016	Tahun 2022	Perubahan
1.	Papua	28,47%	26,56%	-1,91%
2.	Papua Barat	25,15%	21,33%	-3,82%
3.	Nusa Tenggara Timur	22,01%	20,05%	-1,96%
4.	Maluku	19,22%	15,97%	-3,25%
5.	Gorontalo	17,67%	15,42%	-2,25%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 Provinsi yang mempunyai persentase jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia tahun 2016 adalah Provinsi Papua kemudian diikuti oleh Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo. Pada tahun 2022 urutan Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak masih sama seperti tahun 2016. Tetapi, penurunan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat selama 2016 hingga 2022 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan keempat Provinsi yang lain yaitu sebesar -3,82 persen. Berikut adalah perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022.

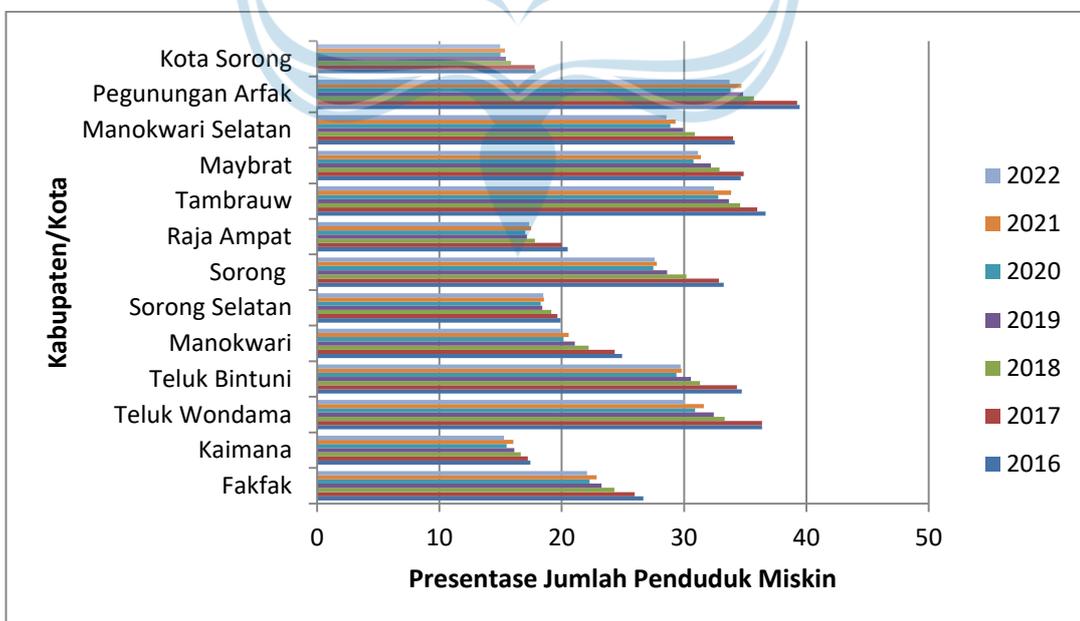


Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah

Gambar 1. 2
Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat

Pemerintah Indonesia selama ini memperhatikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Timur terutama Papua dan Papua Barat yaitu dengan memberikan kebijakan daerah otonomi khusus (Otsus). Tujuan diberikannya dana otonomi khusus adalah untuk pembiayaan pembangunan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan yang paling utama yaitu pembiayaan dalam meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2017 dana otonomi khusus lebih dominan digunakan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan dana tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan ruang kelas, pengadaan buku, asrama siswa, dan pengembangan pusat teknologi dan informasi. Di bidang kesehatan dana otsus digunakan antara lain untuk pengadaan obat-obatan, dan penanggulangan penyakit menular (Kemenkeu, 2017).

Daerah otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat mulai diberikan pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Penilaian atas dampak dari diberikannya dana Otsus kepada Provinsi Papua Barat dapat dilakukan dengan mengamati beberapa indikator pendidikan dan kesehatan yang menjadi tujuan utama dana Otsus, serta indikator kesejahteraan lain yang terkait dengan tujuan diberikannya dana Otsus. Indikator pendidikan dan kesehatan yang diharapkan membaik seperti rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup, serta indikator kesejahteraan seperti persentase jumlah penduduk. Diharapkan dengan diberikannya dana otonomi khusus pada Provinsi Papua Barat dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Gambar berikut menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat.



Sumber: Badan Pusat Statistika (2023), diolah

Gambar 1. 3

Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat

Gambar 1.3, menunjukkan kondisi persentase jumlah penduduk miskin pada berbagai kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Terlihat bahwa di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak dari tahun 2016 – 2022 berada di posisi tingkat kemiskinan paling tinggi kemudian diikuti oleh Teluk Wondama. Pegunungan Arfak merupakan pemekaran daerah otonomi baru dari Manokwari sebagai kabupaten induk, angka kemiskinan di daerah Pegunungan Arfak masih relatif tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah masalah infrastruktur, masyarakat masih jauh dari layanan transportasi yang memadai sehingga sulit untuk melakukan aktivitas.

Perlu usaha keras pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Di samping dana otonomi khusus maka pemerintah perlu membuat program-program untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur yang ada di Provinsi Papua barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2019) menjelaskan bahwa dana otonomi khusus di Provinsi Papua Barat dipergunakan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain dan membantu daerah tersebut dalam meningkatkan perekonomiannya. Tujuan utama ditujukan dana otonomi khusus adalah untuk mensejahterakan dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Indikator tingkat kesehatan dapat ditunjukkan dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan tingkat pendidikan dapat ditunjukkan dari meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Apabila kedua komponen di atas

meningkat maka akan menjadikan peningkatan hasil produksi yang akan menurunkan tingkat kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu Provinsi yg memiliki tingkat kemiskinan tinggi sehingga perlu diketahui:

- 1) Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022?
- 2) Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022?
- 3) Bagaimana pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022?
- 4) Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022

- 4) Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

- 1) Bagi Pemerintah. Diharapkan adanya penelitian ini pemerintah dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Barat
- 2) Bagi Peneliti berikutnya. Diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat dan terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini menguraikan teori-teori dan bukti empiris mengenai dana otonomi khusus, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Papua Barat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini menguraikan mengenai data, model, alat analisis, dan batasan operasional yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV dalam penelitian ini menguraikan mengenai hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang hubungan-hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V PENUTUP

Bab V dalam penelitian ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran selama penelitian ini dilakukan.

